

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Amerika Serikat (AS) merupakan negara yang dominan dalam berbagai sektor dan memiliki tanggung jawab utama untuk menjaga stabilitas global. Stabilitas ini termasuk dari sektor ekonomi, penjamin keamanan, dan penyediaan likuiditas dalam menjaga keamanan serta perekonomian di berbagai kawasan salah satunya adalah kawasan Timur Tengah.¹ Pada Kawasan Timur Tengah sendiri permasalahan yang paling menonjol adalah konflik Israel dengan negara-negara solidaritas Palestina salah satunya adalah Sudan.

Hubungan antara Israel dan Sudan bisa dikatakan memiliki ketidaknormalan karena keberadaan keduanya yang saling bertentangan. Di satu sisi Israel adalah negara yang berdiri diatas tanah Arab atau Palestina yang bahkan hingga saat ini masih berkonflik. Sedangkan disisi lain, Sudan adalah salah satu negara yang menentang eksistensi Israel bahkan dari sebelum kemerdekaannya. Sudan terlibat dalam ketiga perang arab yang terjadi antara negara negara Timur Tengah dan Israel.² Sudan Juga tergabung ke dalam organisasi negara Islam seperti Liga Arab dan *Organization of Islamic Cooperation* (OIC).³ Selain itu, Sudan memiliki undang-undang terkait memboikotan segala jenis hubungan dengan Israel.⁴ Semua bentuk kebijakan yang dilakukan Sudan telah menunjukkan bahwa

¹ Charles P. Kindleberger, *The World in Depression, 1929-1939*, 1973, University of California

² Michael Epple, *The Arab States and the 1948 War in Palestine: The Socio-Political Struggles, the Compelling Nationalist Discourse and the Regional Context of Involvement*, 2012, Middle East Studies

³ Organisation of Islamic Cooperation, diakses pada 20 Februari 2024, <http://www.oic-oci.org/oicv2/states/>

⁴ Yoram Meital, *The Khartoum Conference and Egyptian Policy after the 1967 War: A Reexamination*, Middle East Journal 54, No.1, (2000): 63

akan sangat sulit bagi Israel untuk menormalisasikan hubungannya dengan Sudan.

Ketidaknormalan hubungan diantara kedua negara ini berlangsung selama bertahun-tahun karena Sudan benar-benar memiliki solidaritas kepada Palestina. Namun, hal tersebut mulai goyah sejak tahun 2011 saat Sudan Selatan memerdekakan diri dari Sudan utara (Sudan). Lepasnya Sudan Selatan ini membuat Sudan mengalami krisis yang membuatnya hampir kehilangan 30-40 persen GDP nya.⁵ krisis yang terjadi di Sudan menempatkan Sudan dalam posisi terpuruk. Selain itu, Sudan juga terdaftar sebagai salah satu negara yang mendukung kelompok terorisme. Hal tersebut membuat sangat sulit bagi Sudan untuk mendapatkan bantuan luar negeri dari negara-negara lain terutama negara yang berafiliasi dengan AS. Sulitnya bantuan yang didapatkan ini menunjukkan bahwa memiliki hubungan AS dan barat adalah jalan untuk mendapatkan kesejahteraan dan sangat sulit didapatkan bagi negara-negara solidaritas Palestina. Hal ini dikarenakan adanya ketidaknormalan hubungan dengan Israel yang didukung oleh AS dan sekutunya.

Ketidaknormalan hubungan dari negara-negara solidaritas Palestina ini mulai berubah sejak tahun 2020 dikarenakan ada dua negara solidaritas Palestina yang akhirnya membuka hubungan diplomatik dengan Israel dengan menjadikan AS sebagai pihak ketiga. Normalisasi yang mereka lakukan dengan Israel membuat kedua negara tersebut akhirnya mendapatkan keuntungan yang melimpah dari AS. Keuntungan yang kedua negara ini dapatkan seperti tergabung kedalam *major security partner* AS yang membuka akses bagi kedua negara tersebut untuk menjalin kerjasama dengan sekutu-sekutu dari AS.⁶ Banyaknya keuntungan yang

⁵ Amelinda. Larissa, Analisis Kepentingan Sudan dalam Pembukaan Hubungan Diplomatik dengan Israel Tahun 2020,2022, *Journal of International Relations*, Volume 8, Nomor 2, 2022, hal 110 - 119

⁶ Larissa, Analisis Kepentingan Sudan dalam Pembukaan Hubungan Diplomatik dengan Israel

didapatkan oleh suatu negara jika berafiliasi dengan AS dan sekutunya bisa dilihat sebagai bentuk AS dalam menjaga kestabilan dan perdamaian dunia.

AS sebagai penjaga kestabilan dunia telah ikut terlibat dalam menengahi berbagai konflik internasional terutama konflik Israel dengan negara-negara solidaritas Palestina yang kontra terhadap keberadaan Israel. Sebagai contoh AS terlibat dalam perjanjian damai antara Israel dan Mesir melalui perjanjian *Camp David* pada 1979. Keterlibatan AS ini menunjukkan bahwa AS berusaha untuk membantu Israel dalam penyelesaian konflik dengan negara lain. Hal ini terus berlanjut hingga perjanjian *Abraham Accords* pada 2020 yang didalamnya termasuk agenda normalisasi antara Israel dan Sudan.

Dari sisi Sudan, negara ini dapat dikatakan memiliki hubungan yang bisa dikatakan tidak baik dengan Israel dan AS. Sudan memiliki ketidaknormalan hubungan dengan Israel. Pada saat yang sama, Sudan merupakan negara yang telah beberapa kali memutuskan hubungan diplomasi dengan AS. Hal ini kemudian disusul dengan Sudan juga menjadi negara yang masuk kedalam daftar negara yang menjadi sponsor teroris di Timur Tengah. Meskipun demikian, AS masih tetap memberikan bantuan kepada Sudan. Bantuan ini diberikan pada masa krisis pasca Sudan Selatan memerdekakan diri dari Sudan serta pada masa Covid-19. Bantuan dari AS kepada Sudan kebanyakan dalam bentuk bantuan ekonomi karena memang adanya ketimpangan ekonomi antara Sudan dan AS.⁷ AS diketahui telah memberikan bantuan luar negeri sejak 2011 meskipun pada saat itu Sudan masih menjadi negara yang masuk ke dalam daftar negara yang mendukung terorisme.

Tahun 2020, 112

⁷ Internasional Monetary Fund, *Real GDP Growth*, diakses pada 1 Maret 2024, https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD

Bantuan yang diberikan oleh AS kepada Sudan terus berlanjut hingga masa Covid 19.

AS diketahui menjadi negara yang memberikan bantuan luar negeri atau USAID ke Sudan. Pada masa COVID-19 USAID telah memberikan lebih dari \$98 juta dalam bentuk dukungan tambahan COVID-19 kepada Sudan untuk mengatasi kebutuhan pengiriman vaksin dan kesiapan negara yang paling mendesak, serta mendukung upaya berkelanjutan untuk memitigasi penularan COVID-19 di Sudan.⁸ Kemudian AS juga menghapuskan Sudan sebagai negara sponsor teroris paska normalisasi hubungan dengan Israel 2021. Namun hal tersebut dianggap sebagai hutang oleh Presiden AS pada saat itu yaitu Donald Trump.⁹

Dari sisi Israel, AS mengagendakan adanya normalisasi hubungan Israel dengan negara Islam dan Negara Islam termasuk Sudan dalam berbagai sektor meliputi imigrasi, ekonomi, teknologi, demokrasi dan perdamaian di kawasan. Hal tersebut diusahakan oleh AS karena Israel telah mengalami pertentangan dengan negara-negara solidaritas Palestina bahkan sejak hari kemerdekaanya yang terus berlanjut hingga 3 perang Arab. AS telah terlibat dalam membantu Israel dalam menghadapi serangan dari negara-negara Solidaritas Palestina hingga Israel bisa memenangkan semua perang Arab tersebut. Selain itu, AS menjadi negara yang memberikan bantuan ekonomi terhadap Israel dimana hingga 2023 diketahui total bantuan dari AS ke Israel mencapai \$300 Miliar.¹⁰ Selain itu, AS pada 13 Agustus

⁸ “USAID’s COVID-19 Response in Sudan”, USAID, diakses pada 1 Maret 2024, <https://www.usaid.gov/sudan/usaids-covid-19-response-sudan>

⁹ Sudan "Berutang" Kepada AS Pulihkan Hubungan Dengan Israel” DW, Politik Timur Tengah, 12 Desember 2020, diakses pada Februari 15, 2024, <https://www.dw.com/id/usai-normalisasi-sudan-berutang-kepada-as-pulihkan-hubungan-dengan-israel/a-56024554>

¹⁰ Jonathan Masters, *COUNCIL IN FOREIGN RELATION ;U.S. Aid to Israel in Four Charts*, diakses pada 1 Februari 2024, <https://www.cfr.org/article/us-aid-israel-four-charts>

2020 juga menginisiasikan terbentuknya suatu perjanjian yang dikenal sebagai *Abraham Accords* tentang normalisasi hubungan Uni Emirat Arab (EUA) yang disusul Bahrain pada 11 September dan kemudian Sudan pada 12 Januari 2021.¹¹

AS menginisiasikan normalisasi ini melalui *Abraham Accords* yang bertujuan untuk membantu Israel menormalisasi hubungan diplomatiknya dengan negara-negara solidaritas Palestina. Dalam kasus Israel dan Sudan, kesepakatan normalisasi antara Sudan dan Israel muncul setelah adanya pertemuan antara perdana menteri Sudan Abdallah Handok dengan perdana menteri Israel Benjamin Netanyahu dan presiden AS Donald Trump pada tahun 2021.¹² Setelah pertemuan ketiga kubu ini, Sudan sebagai negara yang telah lama menentang Israel akhirnya menjadi negara Arab ke enam yang pada akhirnya setelah bertahun-tahun bersedia membuka hubungan diplomatik dengan Israel pada 12 Januari 2021.¹³

Berdasarkan yang telah dibahas di atas dapat dikatakan bahwa normalisasi hubungan Sudan dan Israel sebenarnya sulit untuk tercapai, namun semuanya berubah setelah keterlibatan AS. Sehingga menarik untuk diteliti lebih lanjut mengenai tindakan AS dalam memengaruhi keberhasilan normalisasi Israel-Sudan.

1.2. Rumusan Masalah

Permasalahan disini adalah bagaimana ketidaknormalan hubungan

¹¹ Benjamin MacQueen, *An Introduction to Middle East Politics*, Edisi ke 2, Los Angeles: Sage Publications, 2018, hal 68

¹² William J. Spencer, *Global Studies: The Middle East*, Edisi ke 12, New York: McGraw- Hill Companies, 2009, hal 4

¹³ "Sudan PM: Government has 'no mandate' to normalise Israel ties", Aljazeera, 25 Agustus 2020, diakses pada 14 Februari 2024, <https://www.aljazeera.com/news/2020/8/25/sudan-pm-government-has-no-mandate-to-normalise-israel-ties>

diplomasi antara Israel dan Sudan yang sudah berlangsung bertahun-tahun pada akhirnya berubah. Sudan sebagai negara yang telah berkomitmen untuk berdiri sebagai negara yang menentang Israel akhirnya bersedia menormalisasi hubungannya dengan Israel. Normalisasi ini terjadi dengan adanya keterlibatan Amerika Serikat (AS). Setelah adanya keterlibatan AS, Sudan akhirnya bersedia menormalisasi hubungannya melalui perjanjian yang dibuat oleh AS. Perubahan dari arah kebijakan Sudan berkat keterlibatan dan intervensi AS ini menjadi hal yang perlu dilihat tentang bagaimana AS bisa memengaruhi arah kebijakan suatu negara.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan penjelasan di atas muncul pertanyaan yaitu apa tindakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat sehingga dapat membuat Sudan bersedia membuka hubungan diplomatiknya dengan Israel?

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan tindakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat yang dapat membuat Sudan bersedia untuk menormalisasi hubungan diplomatiknya dengan Israel.

1.5. Manfaat Penelitian

- A) Secara teoritis penelitian ini memberikan referensi literatur dalam pengembangan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa, terutama mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional dalam memahami terkait pengaruh intervensi Amerika Serikat dalam proses normalisasi hubungan diplomatik antara Israel dan Sudan.

B) Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber tambahan referensi bagi pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, bisnis, dan lembaga internasional dalam memahami bagaimana peran dari suatu negara yang memiliki pengaruh yang besar dapat merubah arah kebijakan dari negara lain.

1.6. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa literatur dari peneliti sebelumnya untuk memperkuat argumentasi yang digunakan untuk menunjang hasil hasil penelitian dan argumentasi yang digunakan.

Tinjauan pustaka pertama adalah “*From Foes to Friends: The Normalization of the United Emirates Arab and Israel Relations*” yang ditulis oleh Ahmad Mudhofarul Baqi dalam Insignia Journal of International Relation. Tulisan ini menggambarkan tentang bagaimana kebijakan politik luar negeri dan wujud peran Amerika Serikat (AS) terhadap normalisasi hubungan diplomatik Israel dengan negara-negara Timur Tengah. Tulisan ini juga menjelaskan bahwa salah satu peran AS dalam hubungan diplomasi di Timur Tengah adalah sebagai mediator dalam Abraham Accords atau perjanjian Abraham antara Israel dengan Uni Emirat arab pada 2020. Tulisan ini melihat bahwa AS memiliki peran yang cukup penting dalam menjaga kestabilan politik di Timur Tengah melalui normalisasi hubungan Israel dan negara Timur Tengah. Pada tulisan ini dijelaskan bahwa normalisasi yang didorong oleh AS juga merupakan tindakan yang dilakukan oleh AS dalam menekankan peran dan posisi AS sebagai hegemoni dunia baik dari segi politik, keamanan, maupun ekonomi.¹⁴

¹⁴ Ahmad Mudhofarul Baqi, *From Foes to Friends: The Normalization of the United Emirates Arab*

Tulisan ini membantu penulis melihat bagaimana AS menggunakan eksistensinya dalam memainkan peran untuk memengaruhi kebijakan negara lain yang juga sama-sama menentang Israel. Pada tulisan ini juga dijelaskan bahwa AS memiliki hal yang dibutuhkan untuk menjadi hegemoni dan membuat negara Timur Tengah untuk mengikuti arahan dari AS. Hal yang dilakukan oleh AS adalah dengan menjalin hubungan dengan Bahrain dan UEA dalam berbagai bidang sehingga membuat UEA tidak ingin kehilangan hubungannya bisnisnya dengan AS. Sedangkan di sisi lain juga dijelaskan bahwa AS mendukung eksistensi Israel dan menggunakan hubungan bisnisnya dengan UEA untuk membuat UEA bersedia untuk melakukan normalisasi dengan Israel. Meskipun begitu, penelitian ini hanya melihat bagaimana AS memainkan perannya dalam memengaruhi negara yang sedari awal menentang Israel, namun hanya dalam skala kecil dimana bahkan UEA dan hanya menutup hubungan diplomatik tanpa adanya perlawanan nyata.

Tinjauan pustaka ke dua adalah *“The US-backed Moroccan-Israeli Normalization Agreement: Implications on the Future of the Maghreb Union”* oleh Boutkhil Guemide dalam *The Journal of US-Africa Studies*. Tulisan ini menganalisis bahwa perjanjian normalisasi Maroko dengan Israel ini sangat penting bagi kebijakan luar negeri Aljazair di wilayah tersebut, perjanjian tersebut dianggap sebagai perjanjian yang ditengahi oleh Donald Trump, mantan Presiden AS yang bermaksud untuk menormalisasi Israel dan Maroko. Setelah berakhirnya masa jabatan Donald Trump, pemerintahan AS di bawah Joe Biden tidak menolak perjanjian normalisasi Maroko dengan Israel. Mereka menyetujui perjanjian

normalisasi Maroko-Israel karena pengaruh Zionis dalam politik AS.¹⁵

Tulisan ini membantu peneliti dalam melihat bahwa peran AS sebagai mediator perdamaian bukan hanya sebagai kebijakan dari satu presiden, namun memang agenda dari AS itu sendiri. Hal ini terbukti dengan AS yang tetap memainkan perannya sebagai mediator setelah pergantian kepemimpinan dari Trump ke Biden. Tulisan ini juga memperkuat pendapat peneliti bahwa normalisasi Israel di Timur Tengah memang sangat penting bagi AS dalam memperkuat perannya sebagai hegemoni terutama di daerah kaya sumber daya alam.

Tinjauan pustaka ke tiga “*The Camp David Agreement and the Palestine Problem*” oleh Fayez A. Sayegh dalam *Journal of Palestine Studies*. Tulisan ini menjelaskan bahwa AS yang memiliki peran sebagai salah satu negara adidaya setelah perang dunia kedua. Peran AS ini menuntutnya untuk menjaga hubungan dengan sekutu sekutunya di berbagai Kawasan. Salah Kawasan yang menjadi fokus dari AS adalah Kawasan Timur Tengah. Hal ini dikarenakan Kawasan Timur Tengah merupakan Kawasan yang memiliki potensi terutama dalam sumber daya minyak. Hal itulah yang membuat AS merasa perlu untuk menjaga kestabilan Kawasan Timur Tengah yang salah satu caranya adalah dengan menengahi konflik Israel dengan negara-negara Arab.¹⁶

Tinjauan pustaka ke empat adalah “*The Japan-Korea Normalization Process and Korean Anti-Americanism*” oleh J. Mark Mobius dalam dalam jurnal *Asian Survey*. Pada tulisan ini menjelaskan bagaimana AS memainkan peran

¹⁵ Boutkhil Guemide, *The US-backed Moroccan- Israeli Normalization Agreement: Implications on the Future of the Maghreb Union*, *The Journal of US-Africa Studies*, Vol. 1 No. 1 (2019): *The Journal of US-Africa Studies International Journal of US and African Studies*

¹⁶ Fayez A. Sayegh, *The Camp David Agreement and the Palestine Problem*, *Journal of Palestine Studies*, Vol. 8, No. 2 (Winter, 1979), pp. 3-40

sebagai mediator perdamaian antara Jepang dan Korea Selatan Pasca Perang Dunia kedua. Upaya yang dilakukan oleh AS bertujuan untuk memulihkan hubungan bilateral kedua negara ini di Kawasan Asia Timur. Adapun peran AS dalam normalisasi hubungan kedua negara ini adalah sebagai fasilitator, mediator, serta menawarkan bantuan ekonomi agar kedua negara ini bersedia membuka dialog terkait perdamaian dan normalisasi hubungan diantara keduanya. Selain itu, AS juga menekankan bahwa upaya yang dilakukannya adalah sebagai bentuk dari perannya dalam menjaga stabilitas Kawasan terutama Kawasan Asia Timur.¹⁷

Pada tulisan ini menjelaskan bagaimana AS memainkan peran sebagai mediator perdamaian antara Jepang dan Korea Selatan pasca perang dunia kedua. upaya yang dilakukan oleh AS bertujuan untuk memulihkan hubungan bilateral kedua negara ini di kawasan Asia Timur. Adapun peran AS dalam normalisasi hubungan kedua negara ini adalah sebagai fasilitator, mediator, serta menawarkan bantuan ekonomi agar kedua negara ini bersedia membuka dialog terkait perdamaian dan normalisasi hubungan diantara keduanya. Selain itu, AS juga menekankan bahwa upaya yang dilakukannya adalah sebagai bentuk dari perannya dalam menjaga stabilitas kawasan terutama kawasan Asia Timur.

Tinjauan pustaka kelima adalah “*Abraham Accords: A Journey From Arab-Israeli to Palestinian-Israeli Conflict*” yang ditulis oleh Huma Baqai dan Sabiha Mehreen dalam jurnal JISR-MSSE. Tulisan ini menjelaskan bahwa perjanjian Abraham, yang ditandatangani oleh Israel, UEA, dan Bahrain bertujuan untuk meningkatkan kerja sama ekonomi dan keamanan guna melawan pengaruh Iran di

¹⁷ J. Mark Mobius, *The Japan-Korea Normalization Process and Korean Anti-Americanism*, Asian Survey, Vol. 6, No. 4 (Apr., 1966), pp. 241-248

kawasan. Namun, perjanjian-perjanjian tersebut tidak membahas isu-isu utama Palestina, sehingga menimbulkan reaksi beragam dan kekhawatiran mengenai dampaknya terhadap perjuangan Palestina. Perjanjian tersebut mempunyai implikasi terhadap stabilitas regional dan aliansi di Timur Tengah, dengan reaksi berbeda dari negara-negara seperti Iran, Arab Saudi, Turki, Tiongkok, Rusia, dan Pakistan.¹⁸

Tulisan ini dapat membantu peneliti dalam memahami alasan kenapa negara-negara yang sebelumnya kontra Israel pada akhirnya bersedia untuk menormalisasi hubungan mereka dengan Israel. Tulisan ini memperlihatkan bahwa AS benar-benar memiliki daya tarik bagi negara-negara di dunia untuk tetap memelihara kerjasama dan hubungan mereka dengan AS. Hal tersebut menyatakan bahwa AS memiliki peran sentral dalam berbagai bidang yang menjadi senjata utama baginya untuk berdiplomasi demi mencapai kepentingannya. Termaksud bagaimana AS menggunakan semua yang dia punya untuk memainkan peran sebagai mediator perdamaian bagi Israel di Kawasan Timur Tengah sesuai dengan agenda kebijakan luar negerinya.

Dari beberapa tinjauan pustaka yang telah disebutkan diatas, diharapkan dapat mempermudah meneliti dalam menghasilkan kesimpulan yang bisa dipertanggungjawabkan kepada berbagai pihak yang dirasa akan membaca dan menjadikan hasil penelitian ini sebagai pedoman untuk penelitian kedepannya sesuai dengan yang peneliti tulis pada bagian manfaat penelitian. Diharapkan juga semua tinjauan Pustaka bisa menjadi pembanding dalam penelitian kedepannya.

¹⁸ Huma Baqai dan Sabiha Mehreen, *Abraham Accords: A Journey From Arab-Israeli to Palestinian-Israeli Conflict*, JISR-MSSE 19, No. 1, (2021): 113-126

1.7. Kerangka Pemikiran

Menurut Joseph S. Nye *Soft power* merupakan kemampuan suatu negara untuk menarik dan membujuk. Hal ini berbeda dengan *hard power* yang merupakan kemampuan untuk memaksa yang berasal dari penggunaan kekuatan militer atau ekonomi suatu negara. *Soft power* dapat muncul dari daya tarik budaya, cita-cita politik, dan kebijakannya. Meskipun *Hard power* merupakan hal yang penting dalam dunia negara-negara yang mencoba menjaga kemerdekaan dan kedaulatan AS.¹⁹

Sejak pemerintahan presiden George W. Bush, bagi Amerika Serikat *soft power* adalah alat yang digunakan dalam membantu mencegah teroris mendapatkan bantuan kepada negara-negara di dunia. *Soft power* akan membantu Amerika Serikat menangani isu-isu global kritis yang membutuhkan kerja sama multilateral. Meskipun begitu, ketimbang menggunakan salah satunya, lebih baik menggunakan keduanya yang disebut sebagai *Smart Power*. *Smart Power* sendiri bukan *soft power* maupun *hard power*, melainkan *Smart power*.²⁰

1.7.1 Power dalam Dunia Internasional

Joseph menjelaskan bahwa *power* dapat didefinisikan sebagai kapasitas untuk melakukan sesuatu dan dalam situasi tertentu untuk memengaruhi pihak lain agar memperoleh hasil yang kita inginkan.²¹ *Power* sendiri memiliki 3 jenis aspek yaitu :

1. *Face 1* yaitu Ketika negara A menggunakan ancaman atau penghargaan untuk mengubah perilaku B agar tidak sesuai kebijakan awal negara B. negara B

¹⁹ JOSEPH S. Nye, *Soft Power the Means to Success in World*, 2004, Madeline K. Albright

²⁰ Nye, *Soft Power the Means to Success in World*, 147

²¹ Nye, *Soft Power the Means to Success in World*, hal 2

mengetahui hal ini dan merasakan dampak dari kekuatan yang dimiliki oleh negara A.

2. *Face* kedua yaitu ketika negara A mengendalikan agenda serta tindakan dengan cara yang membatasi pilihan yang dimiliki oleh negara B. Negara B mungkin mengetahui atau tidak mengetahui hal ini. Negara B menyadari kekuatan yang dimiliki oleh negara A.
3. *Face* ketiga yaitu ketika negara A membantu menciptakan dan membentuk keyakinan, persepsi, dan preferensi untuk negara B. Negara B mungkin tidak menyadari hal ini atau menyadari dampak dari kekuatan negara A.²²

Antara ketiga *Face* ini digunakan oleh negara A ketika mampu menggunakan power baik *soft power* maupun *hard power*. Hal ini karena terkadang suatu negara terlalu sering para pembuat kebijakan hanya berfokus pada *hard power* untuk memaksa orang lain bertindak melawan kebijakan mereka dan mengabaikan *soft power*.²³

1.7.2 Soft Power dan Hard Power

Banyak jenis sumber daya yang dapat dijadikan *soft power*. Hal yang termasuk kedalam *spectrum soft power* adalah intervensi kebijakan yang dianggap sah oleh negara yang berusaha dipengaruhi, daya tarik dan ajakan yang bersifat persuasif. Jika *hard power* yang berupa dorongan, maka *soft power* adalah tarikan. Jika didefinisikan sepenuhnya, *soft power* adalah kemampuan untuk memengaruhi orang lain secara kooperatif untuk melakukan hal yang diharapkan, membujuk, dan memperoleh simpati untuk mendapatkan hasil yang diinginkan.²⁴

²² Nye, *Soft Power the Means to Success in World*, hal 8

²³ Nye, *Soft Power the Means to Success in World*, hal 10

²⁴ Nye, *Soft Power the Means to Success in World*, hal 12

a. Hard power

Hard power sendiri dapat dilihat dalam dua jenis pembagian yaitu *military power* dan *economic Power*. *Military power* lebih dari sekedar hanya kekuatan militer dari persenjataan yang digunakan untuk memberikan ancaman dan rasa takut. Namun disisi lain, *Military power* juga digunakan untuk memberikan perlindungan kepada sekutu dan bantuan kepada teman. Penggunaan *military power* juga dapat dikategorikan sebagai *soft power* dikarenakan hal ini dapat memengaruhi pihak yang dilindungi. Hal ini karena penggunaan *hard power* ditujukan untuk melindungi rekan dan bisa saja bersifat persuasif kepada rekan dan pihak yang dilindungi.²⁵

Economic power dapat menjadi *hard power* seperti yang seharusnya, namun juga bisa menjadi bagian dari *soft power*. *Economic power* yang besar dalam bidang ekonomi tidak hanya berhasil menghasilkan sumber daya *hard power*, tetapi juga tarikan gravitasi *soft power*. Sumber dari *economic power* ini adalah hal-hal seperti GDP, per kapita, tingkat teknologi, sumber daya alam dan manusia, lembaga politik dan hukum untuk pasar, serta berbagai sumber daya berbentuk keutungan seperti perdagangan, keuangan, dan persaingan.²⁶ Namun disisi lain *economic power* dapat juga dijadikan sebagai kekuatan yang digunakan sebagai alat untuk mengendalikan dan mendominasi.

Economic power dikatakan dapat menjadi alat dalam mendominasi dan alat kontrol ini melalui ketergantungan ekonomi antara suatu negara dengan negara lainnya. Hal ini karena tidak semua negara dengan sumber daya kuat tanpa keahlian

²⁵ Nye, *Soft Power the Means to Success in World*, hal 16

²⁶ Nye, *Soft Power the Means to Success in World*, hal 32

dalam berkembang menjadi kekayaan atau kekuatan nasional. Sebagai contoh tidak semua negara penghasil minyak bisa menjadi negara kaya dikarenakan ruang dan tempat yang menghambat mereka untuk menjadi negara kaya atau negara dengan *economic power* yang kuat. Oleh karena itu negara yang memiliki *economic power* yang tinggi dapat mengontrol negara yang memiliki sumber daya besar, namun lemah secara *economic power*.²⁷

b. Soft power

Kekuatan dari *soft power* terbagi kedalam 3 aspek yaitu budaya, nilai politik, dan kebijakan luar negeri. Budaya sendiri dapat menjadi sumber daya kekuasaan yang penting. Budaya dapat didefinisikan sebagai pola perilaku suatu kelompok dalam menyebarkan pengetahuan serta nilai-nilai, dan budaya itu ada di berbagai tingkatan.²⁸ Nilai politik dapat diartikan sebagai prinsip, keyakinan, dan standar yang memandu perilaku politik dan pengambilan keputusan. Nilai-nilai ini membentuk cara individu dan kelompok memandang isu-isu yang terkait dengan tata kelola, keadilan, hak asasi, dan masyarakat. Sedangkan kebijakan luar negeri didefinisikan sebagai strategi dan tindakan pemerintah dalam hubungannya dengan negara lain. Ini mencakup keputusan dan pendekatan yang diambil suatu negara untuk mengelola interaksinya dengan negara lain dan organisasi internasional.²⁹

Pada abad ke-21 diketahui bahwa *soft power* juga digunakan sebagai bentuk *imperialism*. Bentuk imperialisme ini sering digunakan oleh AS sebagai bentuk dari posisinya yang merupakan negara hegemoni.³⁰ Perbedaan *soft power* dan *hard power* adalah ketika *hard power* memaksa pihak lain untuk melakukan hal yang

²⁷ Nye, *Soft Power the Means to Success in World*, hal 40

²⁸ Nye, *Soft Power the Means to Success in World*, hal 55

²⁹ Nye, *Soft Power the Means to Success in World*, hal 56

³⁰ Nye, *Soft Power the Means to Success in World*, hal 57

diinginkan menggunakan hal yang dimiliki. Namun jika dilihat dari sisi *soft power*, maka hal yang dilakukan selama beberapa waktu adalah membujuk pihak tersebut dengan beberapa hal yang dimiliki. Untuk lebih jelasnya perbedaan dari *soft power* dan *hard power* dapat dilihat dari ketiga *face* berikut :

1. Upaya untuk membuat pihak lain melakukan apa yang diinginkan. *Hard power* adalah Ketika pihak A menggunakan kekuatan/ekonomi dalam memengaruhi kebijakan yang sudah ada. Sedangkan untuk *soft power* nya adalah Ketika pihak A menggunakan daya tarik/persuasif untuk memengaruhi bahkan mengubah kebijakan pihak b yang sudah ada sebelumnya
2. Membingkai dan menetapkan agenda. *Hard power* adalah Ketika A menggunakan kekuatan/pembayaran untuk menghentikan kebijakan pihak B ,tidak peduli B terima atau tidak. Sedangkan *soft power* Ketika pihak A menggunakan daya tarik atau suatu Kerjasama/organisasi sehingga pihak B melihat agenda tersebut sebagai sesuatu yang sah.
3. Membentuk preferensi orang lain. *Hard power* Ketika pihak A menggunakan kekuatan/ekonominya untuk membentuk kebijakan pihak B. sedangkan *soft power* nya adalah Ketika pihak A menggunakan daya Tarik atau Kerjasama/organisasi untuk membentuk kebijakan pihak B.³¹

1.7.3 Smart power

Joseph Nye mendefinisikan *Smart power* sebagai kemampuan untuk menggabungkan sumber daya dari *hard power* dan *soft power* yang menghasilkan suatu strategi yang efektif. Tidak seperti *soft power*, *hard power* merupakan konsep

³¹ Nye, *Soft Power the Means to Success in World*, hal 60

evaluatif sekaligus deskriptif. *Soft power* bisa menjadi hal yang baik ataupun buruk tergantung perspektif normatif atau tergantung pada bagaimana *soft power* ini digunakan. *Smart power* memiliki evaluasi yang tertanam dalam definisi tersebut.³²

Pada abad ke-21 diketahui bahwa *soft power* juga digunakan sebagai bentuk imperialism. Bentuk imperialisme ini sering digunakan oleh AS sebagai bentuk dari posisinya yang merupakan negara hegemoni. *Smart power* tidak lagi digunakan untuk memaksimalkan kekuasaan dan hegemoni saja, namun menggabungkan sumber daya yang dimiliki untuk memaksimalkan kekuasaan.³³ Konsep *Smart power* tentang integrasi dan jaringan yang cerdas dari diplomasi, pertahanan, pembangunan, dan hal lainnya yang menggunakan perpaduan “*hard power* dan *soft power*”.³⁴

Menurut Nye, terdapat 5 langkah yang dilakukan oleh AS dalam menggunakan *smart power* nya.

1. *First step* yang berupa tahap yang membahas mengenai kejelasan tentang tujuan. Tujuan disini berusaha mempertahankan keunggulan atau dominasi dalam sumber daya kekuasaan atau untuk mempromosikan nilai-nilai baik dengan menyempurnakan demokrasi di dalam negeri atau dengan mempraktikkan *intervensionism* liberal di luar negeri.³⁵
2. *Second step* berupa mengembangkan strategi. Strategi disini adalah hal-hal yang dibutuhkan berupa sumber daya yang dimiliki baik dari segi *hard* ataupun juga *soft power*. Menggunakan semua sumber daya yang dimiliki untuk

³² Nye, *Soft Power the Means to Success in World*, hal 14

³³ Nye, *Soft Power the Means to Success in World*, hal 134

³⁴ Nye, *Soft Power the Means to Success in World*, hal 137

³⁵ Nye, *Soft Power the Means to Success in World*, hal 142

mempertahankan dominasi yang dimilikinya.³⁶

3. *Third step* yang berupa tahapan dalam melihat sumber daya dan kebijakan dari target yang ingin dipengaruhi. *Economic power* dan *soft power* cenderung memainkan peran yang lebih besar ketimbang hanya pada *military power*. Oleh karena itu, sumber daya dari target perlu dilihat untuk membandingkan dengan sumber daya yang dimiliki oleh pihak yang ingin dipengaruhi.³⁷
4. *Fourth step* berupa tahapan memilih di antara tindakan *command power* atau *co-optive power* dalam beberapa situasi yang berbeda, dan menyesuaikan taktik yang digunakan.³⁸ *Military power* diperlukan untuk membersihkan pemberontak dari suatu wilayah dan kerusakan pada warga sipil. *Economic power* digunakan dalam hal pembangunan bangsa sering kali dilebih-lebihkan, termasuk sanksi didalamnya. Sedangkan disisi lain *soft power* dibutuhkan untuk membentuk program bantuan sering kali membantu menciptakan lingkungan yang mendukung.
5. *Fifth step* yang berupa penilaian cermat terhadap kemungkinan keberhasilan. Pada Langkah ini diperlukan untuk mencapai tujuannya, baik pada tingkat strategi besar maupun dalam taktik upaya pengaruh tertentu. Ini memerlukan penilaian yang jelas tentang batas-batas internasional.³⁹

Teori *smart power* ini menggabungkan *soft power* dan *hard power* dalam mencapai dan memengaruhi kebijakan negara lain untuk mempertahankan dominasinya. Oleh karena itu, diharapkan teori ini mampu melihat bagaimana peran AS dalam memengaruhi Sudan untuk menormalisasi hubungannya dengan Israel.

³⁶ Nye, *Soft Power the Means to Success in World*, hal 144

³⁷ Nye, *Soft Power the Means to Success in World*, hal 145

³⁸ Nye, *Soft Power the Means to Success in World*, hal 146

³⁹ Nye, *Soft Power the Means to Success in World*, hal 148

1.8. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan beberapa metode penelitian untuk membantu peneliti menemukan jawab pertanyaannya. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1.8.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Adapun jenis metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Robert K. Yin dalam bukunya yang berjudul *Case Study Research: Design and Methods* menjelaskan bahwa jenis penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang menggunakan pengumpulan data yang relevan dalam menganalisis suatu permasalahan yang ingin diteliti. Meskipun Yin beranggapan bahwa penelitian kualitatif tidak terlalu terorganisir rapi seperti penelitian kuantitatif, namun ketajaman penelitian kualitatif dapat ditingkatkan dengan menggunakan analisis terhadap kasus yang dilakukan berulang menggunakan pembandingan serta analisis kritis dari penulis.⁴⁰

1.8.2 Batasan Penelitian

Penelitian “Peran Amerika Serikat dalam Normalisasi Hubungan Diplomatik Israel dan Sudan” diambil dan dibatasi dari 2011 tahun hingga tahun 2021. Tahun 2011 diambil karena merupakan tahun dimana Sudan mulai memasuki Krisis karena tahun tersebut adalah tahun Sudan Selatan Merdeka dan Sudan mulai jatuh ke dalam krisis. Krisis ini terus berlanjut hingga runtuhnya rezim presiden Omar al-Bashir. Hal ini dikarenakan selama rezim Presiden Omar al-Bashir, Sudan

⁴⁰Trista Holwekk,” Robert K. Yin. (2014). *Case Study Research Design and Methods* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage. 282 pages”. 2016, Journal: CJPE; Volume 30; Issue: 1 DOI: 10.3138/CJPE.BR-240

lebih condong ke Arab dan pada tahun yang sama Amerika Serikat telah memulai aksinya dalam mendekati negara-negara Arab untuk menormalisasi hubungannya dengan Israel. Alasan memilih tahun 2021 adalah karena tahun tersebut Sudan akhirnya tunduk dan bersedia untuk menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel setelah keterlibatan AS.

1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis

Unit analisis sendiri merupakan objek yang akan diteliti dan dibahas dalam penelitian kedepannya atau bisa disebut sebagai variabel Dependen. Dalam penelitian ini unit analisis yang akan digunakan adalah “Tindakan Amerika Serikat”. Sedangkan unit eksplanasi atau variabel independen yang akan diteliti adalah “Sudan menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel”. Penelitian ini menggunakan Tingkat analisis yang mengambil pendapat dari Russett dan Starr yang membagi level atau Tingkat analisis menjadi enam yaitu : level individu, peran, pemerintah (*Government*), masyarakat (*Society*), Hubungan Internasional, dan sistem dunia atau *world system*.⁴¹ Adapun tingkat analisis yang dipilih oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sistem dunia (*world system*). Hal ini karena peneliti melihat bahwa penelitian ini melibatkan 3 negara dimana salah satunya adalah negara yang berasal dari Kawasan yang berbeda dan berusaha memainkan peran dalam hubungan diplomatik dari beberapa negara di Kawasan lain.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data dan Jenis Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data ini lebih banyak menggunakan

⁴¹ Yesi Olivia, *Level Analisis Sistem dan Teori Hubungan Internasional*, 2013. Transnasional: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional

literatur bacaan dan sumber data sekunder. Data yang didapat dapat berasal dari artikel jurnal Internasional, artikel jurnal nasional, serta sumber bacaan lainnya. Selain menggunakan buku dan artikel jurnal internasional, peneliti juga menggunakan website yang dianggap peneliti cukup terpercaya seperti U.S. Department State, United Nation in Indonesia, foreign Assistance, dan sebagainya. Selain itu penelitian ini juga memanfaatkan beberapa portal berita Internasional seperti CNN, BBC, The Diplomat, The Guardian, Foreign Affair, dan lainnya.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Adapun Tingkat Analisa data yang digunakan disini adalah Teknik Analisa yang merujuk kepada Miles dan Huberman yang membagi Teknik Analisis menjadi 4 yaitu : pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.⁴²

- A) Pengumpulan data disini dimulai dari mengumpulkan data terkait tindakan yang dilakukan AS dalam keberhasilan normalisasi hubungan Israel Sudan.
- B) Reduksi data merupakan bagian paling penting dimana mengelompokkan data yang didapatkan sebelumnya serta memilah data yang bisa dipakai dan bisa dibuang.
- C) Penyajian data disini yaitu meneliti data yang didapat dengan kerangka pemikiran *smart power*
- D) Penarikan Kesimpulan dilakukan terkait tindakan yang Amerika Serikat yang memengaruhi keberhasilan normalisasi hubungan diplomatik Israel dan Sudan.

1.9. Sistematika Penulisan

⁴² Miles dan Huberman, "Analisis Data Kualitatif," dalam Fachrudin, "Teknik Analisis Data Kualitatif," UIN Syarif Hidayatullah, (Jakarta: 2013), hal. 5.

BAB I Pendahuluan

Pada bagian ini penulis akan membahas gambaran mengenai objek yang akan diteliti. Pada bagian ini terdapat latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka penelitian yang akan digunakan dalam analisis kasus, metodologi penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, batasan masalah, tingkat analisa, unit analisis dan unit eksplanasi, teknik pengumpulan data dan jenis data serta teknik analisis data. Secara garis besar BAB 1 akan memberikan gambaran bagaimana penelitian akan dilakukan kedepannya.

BAB II Kepentingan Amerika Serikat dalam Normalisasi hubungan antara Sudan dan Israel

Pada bagian ini akan membahas mengenai kepentingan Amerika Serikat dalam normalisasi hubungan diplomatik Sudan dan Israel serta bagaimana normalisasi ini sulit untuk terjadi. Pada bagian ini kita akan melihat upaya yang dilakukan oleh Amerika Serikat pada dua periode kepemimpinan yang berbeda.

BAB III DINAMIKA HUBUNGAN AMERIKA SERIKAT DENGAN SUDAN

Pada bagian ini akan membahas terkait bagaimana Hubungan antara Sudan dan Israel terhadap Amerika Serikat (AS). Hal ini dilakukan untuk melihat bagaimana hubungan Sudan dengan AS. Selain itu, pada bab ini juga akan membahas mengenai upaya yang mulai dilakukan oleh Amerika Serikat dalam memengaruhi Sudan. Hal ini dibutuhkan untuk melihat bagaimana pengaruh dari AS terhadap Sudan dan Israel dalam berbagai bidang yang ada baik ekonomi, politik, militer, kebijakan, dan sebagainya. Hubungan dalam berbagai bidang ini perlu dilihat untuk mengukur power dan kekuatan yang dimiliki oleh AS untuk

memengaruhi Sudan.

BAB IV Analisis tindakan Amerika Serikat Dalam Memengaruhi Sudan Untuk Menormalisasi Hubungan Diplomatik dengan Israel

Pada bagian ini akan membahas bagaimana peran dan keterlibatan Amerika Serikat memiliki pengaruh dalam keberhasilan dalam normalisasi hubungan Israel dan Sudan. Menyesuaikan dengan BAB sebelumnya, pada bab ini berusaha melihat tindakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Sudan sehingga Amerika Serikat mampu membuat Sudan pada akhirnya bersedia menormalisasi hubungan diplomatiknya dengan Israel. Tentunya pada bab ini peneliti akan menggunakan kerangka pemikiran yang telah dibahas sebelumnya yaitu *smart power*

BAB V Penutup

Pada BAB V ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dalam keseluruhan BAB sebelumnya. Pada bagian ini pula terdapat saran dari peneliti kepada pihak yang akan melakukan penelitian terkait pembahasan yang sama agar lebih baik lagi.

